



PENGARUH BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DAN KEMANDIRIAN DESA DI MASA PANDEMI TERHADAP KEMISKINAN DESA DI INDONESIA

Gema Otheliansyah¹, Riedho Hizwar²

^{1,2}Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Palembang

Alamat Korespondensi: gemaothe@gmail.com

Abstract

Besides its effect on public health, Covid-19 also affects social and economic aspects in citizen life. To minimize these impacts, the government has distributed the village fund direct cash assistance (BLT DD) as the social safety net program by giving cash to the poor and the underprivileged families in the village. This research aims to determine the effect of BLT DD and the number of independence village as variable to village poverty in 33 Provinces in Indonesia. This study is quantitative research using data panel regression. The result shows that BLT DD and increase on the number of independence village had negative impact on village poverty in 33 Provinces in Indonesia.

Abstrak

Selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat, Covid-19 juga memengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk meminimalisasi dampak tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) sebagai program jaring pengaman sosial dalam bentuk pemberian uang tunai kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh penyaluran BLT DD dan jumlah desa mandiri terhadap kemiskinan desa pada 33 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT DD dan peningkatan jumlah desa mandiri memiliki pengaruh negatif bagi kemiskinan pedesaan pada 33 Provinsi di Indonesia.

Keywords: *The Village Fund Direct Cash Assistance, The Number of Independent Village, Village Poverty.*

JEL Classification: H770, D6

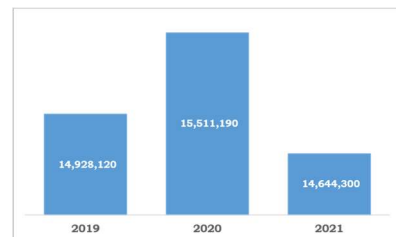


PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) menyebabkan terjadinya kondisi kedaruratan kesehatan dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selama tahun 2020 dan 2021, dampak pada aspek kesehatan ditunjukkan dengan jumlah angka kematian yang mencapai 150.831 jiwa (Satgas Penanganan Covid-19, 2022). Sementara itu, pada aspek ekonomi, pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas perekonomian masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat perkotaan ataupun pedesaan.

Guna menanggulangi dampak Covid-19, telah diterbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang diantaranya mengatur proporsi 40% dari Dana Desa untuk penggunaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) untuk bantuan kepada masyarakat miskin pedesaan dengan kriteria tertentu, diantaranya tidak termasuk ke dalam jaminan sosial yang sudah ada sebelumnya. Salah satu tujuan pelaksanaan kebijakan BLT DD ialah meminimalisasi agar masyarakat miskin pedesaan tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam di masa pandemi. Mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat pada Grafik 1, penduduk miskin pedesaan tahun 2020 berjumlah 15,51 juta jiwa, meningkat 583,07 ribu jiwa dibandingkan tahun 2019. Namun pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin pedesaan Indonesia berkurang 866,89 ribu jiwa menjadi 14,64 juta jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan itu mengindikasikan bahwa berbagai upaya pemerintah melalui

Grafik 1. Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan 2019 s.d. 2021

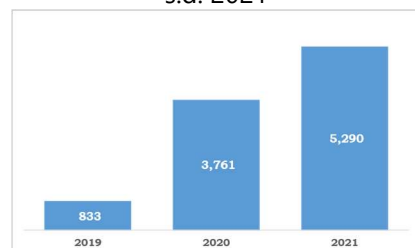


Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

kebijakan fiskal, di antaranya jaring pengaman sosial BLT DD yang mampu menekan angka kemiskinan desa.

Perubahan pengaturan proporsi penggunaan untuk dana desa, yang salah satunya BLT DD dengan porsi 40% banyak dianggap perangkat desa akan mengurangi belanja fisik desa yang akan menghambat capaian untuk nilai indeks desa membangun (IDM). Namun ternyata stigma yang ada, tidak menghambat pemenuhan peningkatan status desa yang ditandai dengan jumlah desa mandiri yang terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Capaian jumlah desa mandiri tahun 2021 juga sudah melampaui target nasional pada RPJMN 2020-2024, yakni sebanyak 5.000 desa. Hal tersebut dibuktikan pada

Grafik 2. Jumlah Desa Mandiri 2019 s.d. 2021



Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2021)

Grafik 2, yakni sebanyak 4.457 desa telah berubah statusnya menjadi desa mandiri di tahun 2021 sejak tahun 2019.

Saat ini program BLT DD telah berjalan selama 2 tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi atas pengaruh pelaksanaan program BLT DD sebagai instrumen dalam meminimalisasi dampak ekonomi pandemi Covid-19. Salah satu indikator keberhasilan program BLT DD dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin pedesaan dengan mempertimbangkan jumlah desa mandiri sebagai variabel yang dapat menjadi indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan proporsi pemanfaatan 40% dana desa untuk BLT DD, khususnya di masa pandemi Covid-19.

TINJAUAN LITERATUR

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2005 adalah program bantuan sosial berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di kondisi tertentu (Izzati et al., 2020). BLT DD merupakan program bantuan langsung tunai yang merupakan porsi dari penggunaan dana desa. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diputuskan melalui musyawarah desa (Kemendes PDTT, 2020). Kriteria untuk KPM BLT DD adalah (1) hilang mata pencaharian, (2) tidak masuk dalam sistem perlindungan sosial, (3) mempunyai anggota keluarga rentan dan sakit kronis, dan (4) keluarga miskin yang dihentikan pemberian JPS.

Pada tahun 2020, besaran BLT DD yang diberikan adalah Rp600.000 per

bulan untuk setiap KPM mulai dari April s.d. Juni. Untuk bulan berikutnya diberikan Rp300.000 setiap bulan. BLT DD pada tahun 2021 diberikan sebesar Rp300.000, per bulan per KPM dan berlaku sejak Januari s.d. Desember 2021.

BLT DD tidak dipungut pajak sehingga bisa digunakan seluruhnya oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan hidup. Program BLT DD juga bersifat sementara untuk mempertahankan tingkat konsumsi KPM sebagai akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Konsep Kemiskinan

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan, BPS memakai pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) berdasarkan data pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Periode survei data dibagi menjadi dua periode, yakni Maret dan September setiap tahunnya. Untuk tingkat kemiskinan per provinsi dibagi menjadi dua, yakni tingkat kemiskinan perkotaan dan tingkat kemiskinan pedesaan.

Desa Mandiri

Pembangunan di desa merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang perwujudannya dinilai dengan capaian IDM. Nilai IDM didapat dari penilaian hasil survei data status kemajuan dan kemandirian desa, yang dilakukan oleh Kemendes PDTT setiap tahunnya.

Dalam penentuan angka IDM mengacu pada 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan. Dimensi sosial terdiri dari empat aspek, yakni kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman. IDM akan menentukan lima klasifikasi status desa, yaitu (1) desa mandiri, (2) desa maju, (3) desa berkembang, (4) desa tertinggal, dan (5) desa sangat tertinggal.

Desa mandiri ialah desa dengan karakteristik seperti memiliki akses pelayanan dasar yang memadai, memiliki infrastruktur yang baik, tidak terdapat kesulitan aksesibilitas/transportasi, menyelenggarakan pelayanan umum dan pemerintahan dengan sangat baik. Suatu desa dianggap mandiri jika memiliki angka IDM lebih besar dari 0,8155. Keistimewaan desa mandiri ialah memiliki tahapan penyaluran dana desa yang hanya melalui dua tahapan, dimana jauh lebih mudah prosesnya dibandingkan desa reguler.

Penelitian Sebelumnya

Studi tentang BLT telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan penekanan yang beragam. Menurut Maun (2020), program BLT bagi masyarakat miskin sangat efektif dan bermanfaat dan mendukung program tersebut.

Selanjutnya, penelitian dari Dewi & Adrianus (2021), menunjukkan bahwa program BLT berdampak pada kemiskinan di Indonesia dari 2005 s.d. 2015. Selain itu, program ini lebih efektif dan efisien dibandingkan bantuan sembako, dikarenakan masyarakat dapat membelanjakan uang bantuan tersebut untuk kebutuhan yang lain, selain kebutuhan pangan.

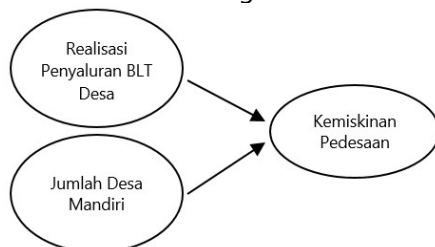
Peranan dana desa sangat memengaruhi peningkatan IDM sehingga pemerintah desa serta masyarakat harus memilih yang mana menjadi prioritasnya. Namun dalam menghadapi kondisi pandemi semua desa diminta mengalokasikan minimal 40% untuk pemberian BLT DD pada KPM. Untuk menunjukkan hubungan pemanfaatan dana desa dalam peningkatan nilai IDM terdapat tiga hasil penelitian sebelumnya, walaupun tidak merujuk khusus pemanfaatan BLT DD dalam peningkatan IDM. Untuk pemberian BLT DD pada KPM dapat dikategorikan sebagai input memberikan akses pendukung potensi yang bisa membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Amalia & Syawie, 2015). Sementara itu, Arina et al. (2021) menyatakan jika dana desa berpengaruh signifikan terhadap angka IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara dimana setiap peningkatan nilai dana desa yang disalurkan, akan menaikkan angka IDM pada desa-desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kesimpulan penelitian-penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Harianti (2019) yang menemukan bahwa peranan dana desa memengaruhi peningkatan nilai IDM yang akan mengubah status desa.

Untuk hubungan antara kemiskinan dan IDM, Fasya (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan terdapat korelasi negatif antara tingkat kemiskinan desa dengan IDM di Kecamatan Jabung. Dimana jika tingkat kemiskinan desa semakin tinggi, maka tingkat IDM akan semakin rendah.

Kerangka Penelitian

Merujuk pendahuluan dan tinjauan literatur yang dijelaskan sebelumnya, kerangka penelitian ini adalah sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

Gambar 3. Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti

Hipotesis

Berdasarkan informasi yang didapat dari penelitian sebelumnya terkait hubungan antara BLT DD dengan tingkat kemiskinan desa yang didukung dengan peningkatan kemandirian desa, maka hipotesis penelitian ini ialah:

H1: Penyaluran BLT DD memiliki pengaruh negatif bagi (tingkat) kemiskinan pedesaan.

H2: Jumlah desa mandiri berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pedesaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Analisis

Data dalam penelitian ini ialah data sekunder dari periode 2020 s.d. 2021 yang diambil pada Januari 2022. Data bersumber dari BPS, yakni untuk data jumlah penduduk miskin desa per provinsi, dari Kementerian Keuangan untuk data penyaluran BLT DD, dan dari Kemendes PDTT untuk data jumlah desa mandiri. Ketiga variabel tersebut dianalisis menggunakan regresi data panel.

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan ialah:

$$\text{LnJPMD}_{it} = \alpha_{it} + \beta_{it} \text{LnBLTDD}_{it} + \beta_{it} \text{JDM}_{it} + \epsilon_{it}$$

LnJPMD : jumlah penduduk miskin desa

LnBLTDD : BLT DD

JDM : jumlah desa mandiri

i : *cross section* data per provinsi

t : periode waktu

Penentuan Model

Dalam regresi data panel, terdapat tiga model untuk mengestimasi parameter dari model Widarjono (2007), antara lain:

1. *Common Effect*, yaitu model yang mengombinasikan data *cross section* dan *time series* dalam satu kesatuan, tanpa melihat perbedaan entitas dan waktu. Pada model *Common Effect*, perilaku data antar individu ialah sama dalam berbagai periode waktu.
2. *Fixed Effect*, yaitu model yang mengasumsikan terdapat perbedaan intersep dari setiap individu, namun memiliki *slope* yang tetap antar individu.
3. *Random Effect*, yaitu model yang juga mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep dari setiap individu, dengan intersep bersifat stokastik.

Selanjutnya perlu dilakukan tiga uji statistik, untuk menentukan model penelitian yang tepat (Widarjono (2007)

1. Uji Statistik F, bertujuan menentukan model terbaik di antara model *Fixed Effect* dan *Common Effect*. Indikatornya berdasarkan nilai probabilitas dari *Cross-Section* F. Jika nilai probabilitas di atas nilai toleransi kesalahan (α), maka model

terbaik adalah model *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas di bawah α , maka model *fixed effect* yang terbaik.

2. Uji Hausman, bertujuan menentukan model terbaik antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Indikatornya berdasarkan nilai probabilitas dari *Cross-section* dan *Random* dari hasil estimasi. Jika nilainya di atas nilai α , maka model *Random Effect* terbaik, dan juga sebaliknya.
3. Uji Langrange Multiplier, bertujuan menentukan model terbaik di antara model *Random Effect* dan *Common Effect*. Indikatornya berdasarkan nilai probabilitas dari Breush-Pagan yang jika nilainya di atas α , maka model *Common Effect* yang dipilih, dan sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik

Analisis Regresi Data Panel dikatakan *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE) jika terbebas dari pelanggaran uji asumsi klasik. Namun, hanya beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan pada model regresi linier. Hal tersebut bergantung dengan model estimasi terbaik yang akan digunakan. Untuk model *Fixed Effect*, uji asumsi klasik yang dilakukan hanya dengan uji heterokedastisitas dan uji multikolinieritas.

Suatu model regresi merupakan model yang baik jika mempunyai nilai varians yang konstan (homokedastisitas) dan/atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghazali, 2011). Untuk melihat hal tersebut, dilakukan Uji Glejser dengan melihat nilai probabilitas dari hasil regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen sesuai dengan pendapat Gujarati (2009). Jika

nilai probabilitas di atas α maka model tidak mengandung heteroskedastisitas.

Menurut Gujarati (2009), multikolinieritas merupakan kondisi dimana terdapat korelasi yang/hampir sempurna antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilaksanakan dengan metode *variance inflation factors* (VIF), berdasarkan nilai *Centered* VIF yang tidak boleh melebihi nilai 10.

Uji Kelayakan Model

- 1) Uji Hipotesis, dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari koefisien regresi melalui nilai hasil estimasi model (Nachrowi, 2006). Terdapat dua jenis uji hipotesis, yaitu uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dan uji signifikansi simultan (uji statistik F). Uji statistik t bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (Ghazali, 2011). Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui jika variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghazali, 2011).
- 2) Koefisien Determinasi (R^2), digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menerangkan varian dari variabel dependen. Nilai R^2 berada di antara nol dan satu. Jika nilai R^2 sama dengan 0, variasi dari variabel dependen tidak dapat diterangkan oleh variabel independen sama sekali. Selanjutnya jika nilai R^2 sama

dengan 1, menandakan variasi variabel dependen secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independen. Pada penelitian ini, yang digunakan ialah *Adjusted R²* guna mendapatkan hasil yang lebih baik, karena sifat *R²* yang bias terhadap penambahan dari jumlah variabel independen (Ghazali, 2011:97)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penentuan Model

Berdasarkan hasil pengujian terhadap model dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, dari hasil Uji Chow, model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect*. Selanjutnya dari Uji Hausman didapatkan jika model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan model *Random Effect*. Sehingga model terbaik yang digunakan dalam estimasi adalah model *Fixed Effect*.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model

No.	Uji	Prob.	α	Model
1	Uji Chow	0.00	5%	FE
2	Uji Hausman	0.00	5%	FE

Sumber: Diolah Peneliti

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser pada Tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel log BLTDD dan DM sebesar 0,35 dan 0,6. Nilai probabilitas tersebut berada diatas nilai tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat dikatakan jika data penelitian terbebas heteroskedastisitas.

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS Method: Panel Least Squares Date: 03/02/22 Time: 13:34 Sample: 2020 2021 Periods included: 2 Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 66				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.468807	1.153962	1.272839	0.2078
LOG(BLTDD)	-0.039961	0.043179	-0.925486	0.3582
DM	0.000157	0.000300	0.522906	0.6029

Sumber: Diolah Peneliti

Uji Kelayakan Model

Dari uji statistik t atas variabel LnBLTDD dan DM di Tabel 3, ditemukan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, menunjukkan kedua variabel tersebut memiliki

Tabel 3. Uji Kelayakan Model

No	Uji	Variabel	Prob	Hasil
1.	Uji	LnBLTDD	0.04	signifikan
2.	Statistik t	DM	0,00	signifikan
3.	Adj. R ²		0.999445	

Sumber: Diolah Peneliti

pengaruh signifikan terhadap variabel JPMDD.

Selanjutnya, nilai *Adjusted R²* bernilai 0,999445, menjelaskan kemampuan variabel independen BLTDD dan DM dalam menjelaskan varians dari variabel dependen JPMDD sebesar 99,94%. Dari dua indikator tersebut, model *fixed effect* layak digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Deskriptif Kemiskinan Desa

Masih tingginya jumlah penduduk miskin desa, mengindikasikan belum terwujudnya kesejahteraan di desa. Jumlah penduduk miskin pedesaan pada 33 provinsi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 866.839 jiwa atau turun 5,59% dibandingkan tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan di 33 Provinsi

Provinsi	Kemiskinan		
	2020	2021	Perubahan
Aceh	649,020	654,790	-0.89%
Sumut	600,480	548,030	8.73%
Sumbar	223,470	205,390	8.09%
Riau	312,760	305,670	2.27%
Jambi	155,500	153,750	1.13%
Sumsel	715,220	723,230	-1.12%
Bengkulu	206,600	192,970	6.60%
Lampung	831,860	770,540	7.37%
Babel	43,670	42,430	2.84%
Kep. Riau	20,790	18,440	11.30%
Jabar	1,183,570	1,053,790	10.97%
Jateng	2,229,440	2,086,920	6.39%
DIY	149,930	142,780	4.77%
Jatim	2,765,840	2,490,690	9.95%
Banten	317,490	275,660	13.18%
Bali	71,440	73,860	-3.39%
NTB	356,440	347,640	2.47%
NTT	1,054,650	1,025,700	2.74%
Kalbar	281,610	264,960	5.91%
Kalteng	87,450	83,170	4.89%
Kalsel	128,080	117,410	8.33%
Kaltim	115,880	111,850	3.48%
Kaltara	27,540	25,610	7.01%
Sulut	124,190	116,410	6.26%
Sulteng	316,310	294,540	6.88%
Sulsel	605,160	566,620	6.37%
Sultra	244,100	252,250	-3.34%
Gorontalo	163,760	163,090	0.41%
Sulbar	130,910	138,270	-5.62%
Maluku	272,530	245,940	9.76%
Malut	69,520	63,580	8.54%
Pap. Barat	188,470	193,100	-2.46%
Papua	867,500	895,260	-3.20%

Sumber: BPS (2020-2021)

Pada 26 provinsi, terdapat penurunan tingkat kemiskinan pedesaan. Penurunan kemiskinan desa terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur, yakni sebesar 275.150 jiwa. Sedangkan penurunan tertinggi terdapat pada Provinsi Banten, yakni sebesar 13,18%. Sementara itu, terdapat tujuh provinsi mengalami penambahan jumlah penduduk miskin pedesaan selama masa pandemi. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan penambahan jumlah penduduk miskin pedesaan terbanyak, yakni sebesar 27.760 jiwa.

Penyaluran BLT DD

Penyaluran BLT DD merupakan upaya mempertahankan tingkat konsumsi KPM sebagai dampak pandemi. Secara umum, jumlah penyaluran BLT DD di 33 provinsi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4,71 triliun atau 20,67% dibandingkan tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Peningkatan penyaluran BLT DD tertinggi terdapat pada Provinsi Bali sebesar Rp217 miliar (98,53%). Sedangkan penurunan penyaluran BLT DD terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp416 miliar (-28,14%). Jika dikonversi menjadi jumlah KPM, maka terdapat 1.787.918 KPM yang belum mendapatkan BLT.

Peningkatan Desa Mandiri

Peningkatan status desa menjadi desa mandiri mengindikasikan telah tercapainya kesejahteraan masyarakat di desa melalui tata kelola pembangunan desa yang semakin baik. Secara umum, jumlah desa mandiri di 33 provinsi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.529 jiwa atau naik 40,65% dibandingkan tahun 2020.

Seperti yang dijelaskan pada Tabel 6, pada 26 provinsi, mengalami peningkatan jumlah desa mandiri. Peningkatan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 365 desa. Sementara itu, terdapat tujuh provinsi tidak mengalami penambahan jumlah desa mandiri selama masa pandemi.

Tabel 5. Penyaluran BLT DD di 33 Provinsi

Provinsi	BLT Dana Desa		
	2020	2021	Perubahan
Aceh	1,153,161,000,000	2,218,557,054,321	92.39%
Sumut	1,250,904,300,000	1,718,642,972,800	37.39%
Sumbar	379,923,300,000	383,722,704,000	1.00%
Riau	504,114,000,000	638,511,300,074	26.66%
Jambi	410,099,400,000	393,375,043,000	-4.08%
Sumsel	904,038,900,000	1,076,042,052,100	19.03%
Bengkulu	252,638,100,000	358,532,700,000	41.92%
Lampung	752,786,700,000	676,203,483,200	-10.17%
Babel	119,700,900,000	198,538,800,000	65.86%
Kep. Riau	82,497,900,000	121,191,600,000	46.90%
Jabar	2,464,011,000,000	2,880,742,692,464	16.91%
Jateng	3,223,499,400,000	2,316,562,709,720	-28.14%
DIY	164,384,700,000	152,197,500,400	-7.41%
Jatim	2,609,590,200,000	2,854,548,105,961	9.39%
Banten	480,740,700,000	593,509,970,000	23.46%
Bali	220,605,000,000	437,968,300,000	98.53%
NTB	516,355,200,000	499,373,300,000	-3.29%
NTT	982,495,200,000	1,348,764,872,500	37.28%
Kalbar	545,056,200,000	693,640,693,530	27.26%
Kalteng	353,394,300,000	431,460,580,000	22.09%
Kalsel	441,041,700,000	831,897,775,001	88.62%
Kaltim	187,269,000,000	187,411,200,000	0.08%
Kaltara	66,318,300,000	119,979,400,000	80.91%
Sulut	349,072,500,000	485,932,150,000	39.21%
Sulteng	474,991,500,000	506,923,486,051	6.72%
Sulsel	768,664,500,000	928,398,444,241	20.78%
Sultra	456,919,200,000	443,030,250,001	-3.04%
Gorontalo	204,695,100,000	228,112,605,640	11.44%
Sulbar	224,174,700,000	256,713,600,000	14.51%
Maluku	280,728,900,000	401,352,096,999	42.97%
Malut	201,727,800,000	295,955,000,000	46.71%
Pap.Barat	273,115,500,000	516,431,150,000	89.09%
Papua	1,479,200,100,000	2,292,853,712,643	55.01%

Sumber: BPS, (2020-2021)

Pengaruh BLT DD dan Peningkatan Jumlah Desa Mandiri terhadap Kemiskinan

Dari hasil estimasi terhadap model data panel *Fixed Effect*, maka didapatkan koefisien dari variabel yang digunakan sebagaimana ditunjukkan di Tabel 7.

$$\text{LnJPMD}_{it} = 14,08 - 0,06 \text{ LnBLTDD}_{it} - 0,0003 \text{ DM}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil estimasi model data panel pada Tabel 7, didapatkan bahwa variabel BLT DD (LnBLTDD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pedesaan (LnJPMD), yang

Tabel 6. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri di 33 Provinsi

Provinsi	Jumlah Desa Mandiri		
	2020	2021	Perubahan
Aceh	32	41	28.13%
Sumur	9	16	77.78%
Sumbar	45	76	68.89%
Riau	61	101	65.57%
Jambi	87	127	45.98%
Sumsel	7	9	28.57%
Bengkulu	9	16	77.78%
Lampung	21	60	185.71%
Babel	11	13	18.18%
Kep. Riau	1	1	0.00%
Jabar	270	586	117.04%
Jateng	140	199	42.14%
DIY	67	109	62.69%
Jatim	332	697	109.94%
Banten	5	5	0.00%
Bali	211	296	40.28%
NTB	28	52	85.71%
NTT	1	3	200.00%
Kalbar	214	385	79.91%
Kalteng	20	55	175.00%
Kalsel	6	28	366.67%
Kaltim	51	87	70.59%
Kaltara	19	31	63.16%
Sulut	33	89	169.70%
Sulteng	12	19	58.33%
Sulsel	25	115	360.00%
Sultra	0	3	300.00%
Gorontalo	2	6	200.00%
Sulbar	1	1	0.00%
Maluku	20	42	110.00%
Malut	0	0	0.00%
Pap.Barat	0	0	0.00%
Papua	1	1	0.00%

Sumber: Kemendes PDTT (2020-2021)

Tabel 7. Hasil Estimasi Model Fixed Effect Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t	Prob.
C	14.08	0.78	17.96	0,00
LnBLTDD	-0.06	0.03	-2.09	0,04
DM	-0.0003	0.00	-3.22	0.01

Sumber: Diolah Peneliti

ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0.061. Artinya dalam setiap kenaikan BLT DD sebesar 1%, maka secara rata-rata jumlah penduduk miskin desa akan turun sebesar 0,06%.

Untuk variabel jumlah desa kategori mandiri (DM) juga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan pedesaan (LnJPMD), yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,0003. Artinya, setiap kenaikan jumlah desa mandiri (DM) sebanyak satu desa secara rata-rata, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin desa sebanyak 0,0003%. Berdasarkan dua nilai koefisien tersebut, maka dua hipotesis penelitian diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesimpulan yang dapat diambil, yakni penyaluran BLT DD memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pedesaan. Nilai koefisien dari hasil uji, memperkuat tujuan dari program BLT DD yaitu meminimalkan dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat miskin pedesaan. Selanjutnya, peningkatan jumlah desa mandiri juga berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kemiskinan pedesaan. Secara umum, pembuktian hipotesis sejalan dengan maksud tujuan kebijakan BLT DD, khususnya di masa pandemi yang mana dapat meningkatkan/ mempertahankan taraf hidup masyarakat desa dengan tetap dapat memperbaiki pemenuhan indeks kemandirian desa sehingga dapat memberikan kontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan di desa.

Berikut rekomendasi yang dapat diusulkan adalah pertama, perangkat desa dan pemda perlu memastikan penyaluran dan penggunaan BLT DD agar tepat sasaran dan tepat jumlah sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih besar pada tingkat kemiskinan desa. Rekomendasi kedua,

pemerintah perlu untuk mempertimbangkan kinerja dan status kemandirian desa dalam memperhitungkan alokasi dana desa. Ketiga, penelitian tentang pengaruh BLT DD terhadap kemiskinan pedesaan agar dapat dilanjutkan dengan menambahkan series data dan variabel lainnya, yang dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait efektivitas program BLT DD dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan desa.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pembuat kebijakan, mulai dari Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Kemendes PDTT, Kemendagri serta pemerintah daerah penerima dana desa dalam pemaksimalan pemanfaatan penyaluran BLT DD dalam upaya mengatasi kemiskinan desa. Selain itu, dapat mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PMD kab/kota untuk meningkatkan jumlah desa mandirinya sehingga dapat mendorong upaya penurunan kemiskinan desa.

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, yakni pertama, periode penelitian hanya menggunakan dua periode, dimulai dari tahun 2020-2021. Hal ini disebabkan masih terbatasnya data penyaluran BLT DD yang juga merupakan program baru pemerintah. Keterbatasan kedua, sampel penelitian sebanyak 66 observasi dengan 33 provinsi periode 2020 s.d. 2021 berdasarkan *subjective purposive sampling*, yang akan memberikan hasil

berbeda jika menggunakan teknik pengambilan sampel yang lain.

REFERENSI

- Amalia, A. D. & Syawie, M. (2015). Pembangunan kemandirian desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu kajian dalam perspektif sosiologi. *Jurnal Sosio Informa*, 1 (2), 175–188.
- Arina, M. & Een N.W. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41
- Dewi, Ratna, & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. *Jurnal Menara Ilmu*, XV (2), 77-84
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianti. (2019). *Analisis dana desa dan pengaruhnya terhadap status desa di Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi, Universitas Mataram.
- Fasya, M. N. (2020). *Hubungan kemiskinan dan indeks desa membangun di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang*. Thesis, Universitas Brawijaya.
- Izzati, R. A., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). *The behavioral effects of unconditional cash transfers: Evidence from Indonesia*. Jakarta: The Smeru Research Institute
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak

- Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2),
- Nugroho, H. (1995). *Kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nachrowi, D. N. & Usman, H. (2002). *Penggunaan teknik ekonometrika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020a). *PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020c). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022d). *Analisis Data Covid-19 Indonesia Update Per 08 Maret 2022*.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis, Edisi kedua*. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.